

## Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Jambi Dan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2018-2022

Restiana<sup>1</sup>, As'ad Isma<sup>2</sup>,  
Ahmad Syukron Prasaja<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
email: [restiana03september2002@gmail.com](mailto:restiana03september2002@gmail.com), [asadisma@uinjambi.ac.id](mailto:asadisma@uinjambi.ac.id),  
[syukronprasaja@uinjambi.ac.id](mailto:syukronprasaja@uinjambi.ac.id)

Korespondensi penulis: [restiana03september2002@gmail.com](mailto:restiana03september2002@gmail.com)

**Abstract:** Regional government financial performance is a measure used to ensure the region's ability to implement financial implementation regulations properly and correctly to maintain desired services. 11 districts in Jambi province, Jambi City government and Tebo district government. Fluctuations occur. The difference in regional income between the Jambi city government and Tebo district government is the highest and lowest in 2022. This research aims to determine the comparison of the financial performance of the Jambi City Government and the Tebo Regency Government. 2018- 2022. This research is descriptive quantitative research. Data collection techniques in this research use documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis with the formula: Regional Financial Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Harmony Ratio and Growth Ratio. The results of the research show that the financial performance of the Jambi City government and the Tebo Regency government in 2018-2022 seen from the regional financial independence ratio shows that the level of financial independence of Jambi City is on average higher than that of Tebo Regency, seen from the effectiveness ratio shows that the level of effectiveness shows that the government Tebo Regency is more effective than Jambi City, judging from the Efficiency Ratio, it shows that the percentage of Tebo Regency's efficiency level is smaller than Jambi City. Tebo Regency and Jambi City are categorized as less efficient in managing finances, seen from the harmony ratio, it shows that the two regions allocate more funds for operational expenditure than capital expenditure, and seen from the growth ratio, Jambi City's PAD growth is higher than that of Tebo Regency.

**Keywords :** Financial Performance, Regional Financial Independence Ratio, Ratio Effectiveness, Ratio Efficiency, Harmony Ratio, Growth Ratio

**Abstrak :** Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam menjalankan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan. 11 kabupaten yang ada di provinsi jambi, pemerintah Kota jambi dan pemerintah kabupaten tebo Terjadinya fluktuasi Selisih pendapatan daerah pada pemerintah kota jambi dan pemerintah kabupaten tebo tertinggi dan terendah Pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo 2018- 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan rumus: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2018-2022 dilihat dari Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kota Jambi secara rata-rata lebih tinggi dibanding dengan kabupaten tebo, dilihat dari Rasio efektivitas menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tebo lebih efektif dibanding dengan Kota Jambi, dilihat dari Rasio Efisiensi menunjukkan presentase tingkat efisiensi Kabupaten Tebo lebih kecil dibandingkan dengan Kota Jambi. Untuk Kabupaten Tebo dan Kota Jambi dikategorikan kurang efisien dalam mengelola keuangan, dilihat dari Rasio keserasian menunjukkan kedua daerah lebih mengalokasikan dananya untuk belanja operasi dibanding dengan belanja modal, dan dilihat dari Rasio pertumbuhan bahwa pertumbuhan PAD kota Jambi lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten tebo.

**Kata kunci :** Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan

### LATAR BELAKANG

Dengan memberikan hak otonomi daerah, pemerintah daerah harus membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah tersebut. Ini juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang diputuskan dan disetujui oleh DPRD dan pemerintah daerah secara bersamaan. Peraturan Daerah kemudian menjadi undang-undang.

Sudah jelas bahwa penurunan pendapatan masyarakat akan berdampak pada kekayaan pemerintah daerah, terutama dalam sektor pendapatan pajak daerah. Karena pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi pemerintah daerah. Pembangunan daerah akan mendapat manfaat dari pengelolaan ekonomi lokal yang efektif. Pemerintah kota Jambi dan pemerintah kabupaten Tebo mengalami dampak yang luar biasa dari pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Banyak industri mengalami penurunan pendapatan, dan beberapa usaha kecil dan menengah (UMKM) harus menutup karena kebangkrutan.

Keseriusan pengelolaan keuangan daerah kota ditunjukkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan daerah untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. APBD dapat dijadikan tolak ukur penilaian hasil keuangan suatu pemerintahan daerah. Anggaran dapat menjadi contoh efisiensi dan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan diukur dari kemampuan organisasi dalam menyediakan pelayanan publik yang terjangkau dan berkualitas. Pelaporan tidak hanya sekedar kemampuan untuk menunjukkan bagaimana anggaran negara digunakan, tetapi juga kemampuan untuk menunjukkan bahwa anggaran negara digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif (value for money). Artinya, setiap anggaran yang dibuat oleh pemerintah harus mempengaruhi kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat serta dibutuhkan oleh masyarakat.

Analisis rasio keuangan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu parameter yang mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sejumlah rasio dapat digunakan untuk menganalisis indikator perekonomian suatu daerah, antara lain rasio kemandirian perekonomian daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio keselarasan, dan rasio pertumbuhan. Untuk mengukur kualitas dan keandalan laporan keuangan daerah, dilakukan analisis metode dan langkah-langkah yang tepat, sehingga hasil analisis yang ada dapat digunakan dalam pengambilan keputusan politik pemerintah pusat dalam bentuk tabel dan secara transparan.

**Tabel 1.**

**Realisasi Pendapatan Daerah 11 Kabupaten Di Provinsi Jambi  
Tahun 2018 – 2022 (Didalam Miliar)**

<b>Nama Kabupaten Provinsi Jambi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kota Jambi	1.624,88	1.699,54	1.621,83	1.652,95	1.757,29
Bungo	1.261,74	1.349,86	1.273,51	1.305,52	1.266,99
Kerinci	1.202,47	1.298,74	1.203,60	1.185,94	1.153,68
Merangin	1.334,26	1.508,60	1.370,62	1.375,63	1.320,76
Muaro Jambi	1.319,28	1.400,69	1.323,38	1.388,38	1.168,74
Sarolangun	1.226,39	1.324,27	1.155,46	1.388,38	1.204,38
Tanjung Jabung Barat	1.383,04	1.642,34	1.421,42	1.540,40	1.413,45
Tanjung Jabung Timur	1.093,50	1.195,75	1.052,61	1.163,13	1.130,68
Tebo	1.099,90	1.157,28	1.085,60	1.167,20	894,00
Batang Hari	1.199,73	1.320,72	1.197,33	1.344,30	1.268,59
Kota Sungai Penuh	727,12	823,16	749,34	778,20	805,77

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/> di akses 2023

**Tabel 2.  
Selisih Realisasi Pendapatan Daerah 11 Kabupaten Di Provinsi Jambi  
Tahun 2018 - 2022**

<b>Selisih</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kota Jambi	74,66	-77,71	31,12	104,34
Bungo	88,12	-76,35	32,01	-38,53
Kerinci	96,27	-95,14	-17,66	-32,26
Merangin	174,34	-137,98	5,01	-54,87
Muaro Jambi	81,41	-77,31	65,00	-219,64
Sarolangun	97,88	-168,81	232,92	-184,00
Tanjung Jabung Barat	259,30	-220,92	118,98	-126,95
Tanjung Jabung Timur	102,25	-143,14	110,52	-32,45
Tebo	57,38	-71,68	81,60	-273,20
Batang Hari	120,99	-123,39	146,97	-75,71
Kota Sungai Penuh	96,04	-73,82	28,86	27,57

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/> di akses 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 11 kabupaten yang ada di provinsi jambi dimana dilihat dari pendapatan daerah dalam beberapa tahun belakang mengalami fluktasi, fluktuasi ini disebabkan oleh COVID-19 pada tahun 2020 tetapi setelah COVID-19 pendapatan daerah masih mengalami fluktasi.

**Grafik 1.**

**Selisih Realisasi Pendapatan Daerah 11 Kabupaten Di Provinsi Jambi  
Tahun 2018 – 2022**



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa 11 kabupaten yang ada di provinsi jambi, Kota jambi dan kabupaten tebo mengalami flukstasi tertinggi dan terendah, Pada tahun 2022 selisih pendapatan kota jambi jauh lebih tinggi dibandingkan selisih pendapatan kabupaten tebo jauh lebih terendah. nilai selisih pendapatan pemerintah kota jambi tahun 2022 yaitu (104,34) sedangkan nilai selisih pendapatan pemerintah kabupaten tebo tahun 2022 yaitu (-273,20) dengan adanya selisih tersebut terjadinya flukstasi antara pemerintah kota jambi dan pemerintah kabupaten tebo.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan telah diterapkan pada pemerintahan daerah sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 1999. mulai digunakan. Seseorang dapat melihat teori keagenan dari dua sudut pandang: hubungan antara eksekutif dan legislatif dan hubungan legislatif dengan rakyat. Pemerintah bertindak sebagai agen atau pengelola pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi keuangan pemerintah dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat sebagai prinsipal. Sebagai pelaksana, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memberikan laporan keuangan yang akurat dan lengkap serta memastikan bahwa stake holder yang membutuhkan laporan keuangan dapat mengaksesnya. Pemerintah daerah juga akan berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan, untuk menghindari ketidakpercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja mereka. Principal sangat menginginkan agen untuk berkinerja baik. Jika pemerintah berfungsi dengan baik, orang akan mempercayai pemerintah.

### 2. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks globalisasi, otonomi luas diharapkan memungkinkan Daerah untuk meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan, antar pemerintahan daerah, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Hubungan wewenang harus mempertimbangkan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya dilaksanakan secara adil dan selaras. Selain itu, perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dengan hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

### 3. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dengan menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan bertujuan mengevaluasi kinerja sebelumnya dan menentukan posisi keuangan saat ini melalui berbagai analisis. Penggunaan analisis rasio terhadap APBD merupakan cara untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah mencakup kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli untuk memenuhi kebutuhan yang mendukung sistem Pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Daerah ini tidak sepenuhnya tergantung pada pemerintah pusat dan memiliki kebebasan dalam menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat.

### 4. Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan merupakan bagian dari analisis laporan keuangan yang penting. Analisis harus dilakukan dengan cermat agar dapat menjadi dasar pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menganalisis laporan keuangan termasuk aspek keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi operasional perusahaan. Selain itu, penting juga memperhatikan tren dan perbandingan dengan periode sebelumnya atau industri sejenis.

## 5. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menganalisis rasio keuangan suatu pemerintah daerah melibatkan perbandingan angka-angka dari laporan keuangan untuk mengetahui keadaan keuangan daerah guna mengevaluasi kinerja keuangan selama periode waktu tertentu. Secara umum, rasio keuangan berbeda-beda dalam hal kepentingan dan kegunaannya, dan jenis analisis yang berbeda juga dapat menyebabkan perbedaan pada rasio tersebut.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan suatu pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis terhadap rasio APBD yang kinerjanya telah ditentukan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya pada APBD belum banyak digunakan sehingga secara teoritis belum ada konsensus mengenai nama dan aturan pengukurannya. Namun, sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efisien dan bertanggung jawab, analisis rasio APBD tetap harus dilakukan meskipun prinsip akuntansi APBD berbeda dengan prinsip keuangan yang dianut oleh perusahaan swasta.

## 6. Pemerintah Daerah

Pihak pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial. Mereka wajib menyampaikan laporan keuangan daerah, yang menjadi alat penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah. Evaluasi efektivitas dapat dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan APBD.

Hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam mencapai pendapatan daerah.
2. Menilai sejumlah kegiatan Pemerintah Daerah dalam menggunakan pendapatan daerah untuk belanja.
3. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam membentuk pendapatan daerah.

## 7. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran kapasitas Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

### 1. Indikator Masukan (Inputs)

- Definisi : Segala yang diperlukan agar pelaksanaan aktivitas dapat dijalankan untuk menghasilkan output.
- Contoh : Jumlah dana yang diperlukan, jumlah pekerja yang diperlukan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah masa yang digunakan.
- Pentingnya : Menilai kecukupan dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas pemerintah daerah.

## 2. Indikator Proses (Process)

- Definisi : Merumuskan ukuran aktivitas dari segi kecepatan, ketepatan, dan tingkat ketepatan pelaksanaan kegiatan.
- Contoh : Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menghasilkan atau memberikan pelayanan.
- Pentingnya : Mengukur efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, serta mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan dan regulasi.

## 3. Indikator Keluaran (Output)

- Definisi : Sesuatu yang diharapkan dapat dicapai secara langsung dari aktivitas yang dapat dilakukan secara fisik atau non-fisik.
- Contoh : Bilangan produk atau pelayanan yang dihasilkan, ketepatan dalam menghasilkan barang atau jasa.
- Pentingnya : Mengukur hasil langsung dari suatu aktivitas, baik itu dalam bentuk barang atau jasa, dan menilai sejauh mana aktivitas tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan.

## 4. Indikator Hasil (Outcome)

- Definisi : Apa pun yang menggambarkan fungsi output aktivitas dalam jangka waktu sederhana.
- Contoh : Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan, produktivitas para karyawan atau pegawai.
- Pentingnya : Menilai dampak lebih jauh dari aktivitas tersebut dalam jangka waktu yang lebih panjang, terkait dengan kualitas hasil dan produktivitas.

## 5. Indikator Manfaat (Benefit)

- Definisi : Keuntungan terkait dengan tujuan utama dari pelaksanaan bisnis.
- Contoh : Tingkat kepuasan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat.
- Pentingnya: \* Mengukur dampak positif yang dihasilkan oleh kegiatan pemerintah daerah terhadap masyarakat, termasuk sejauh mana tujuan utama tercapai.

## 6. Indikator Dampak (Impact)

- Definisi : Petunjuk tentang kesan baik positif maupun negatif dari kegiatan.
- Contoh : Peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat.
- Pentingnya : Menilai dampak nyata dari kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat secara keseluruhan.

## 8. Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan Pemahaman Mengenai Ukuran Kinerja: Memberikan wawasan mengenai ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, membantu organisasi dalam menentukan parameter-parameter evaluasi.

- b. Menunjukkan Arah Pencapaian Target : Memperlihatkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memberikan gambaran apakah organisasi bergerak menuju pencapaian tujuannya.
- c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja : Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya, memungkinkan perbaikan berkelanjutan.
- d. Mengungkap dan Memecahkan Masalah : Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada dalam proses dan pelaksanaan kegiatan, memungkinkan tindakan korektif.
- e. Memahami Proses Kegiatan : Memberikan pemahaman lebih dalam terkait proses kegiatan di instansi pemerintah, membantu identifikasi area yang perlu ditingkatkan.
- f. Pengambilan Keputusan Objektif : Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, didasarkan pada data dan fakta yang terukur.

#### 9. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD, jadi itu identik dengan APBD. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. Semua bentuk dan kewajiban daerah tersebut harus dikelola melalui sistem pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah yang dikelola secara langsung dan kekayaan daerah yang terpisah termasuk dalam ruang lingkup keuangan daerah. yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang inventaris milik daerah. Di sisi lain, keuangan daerah yang dipisahkan mencakup (BUMN).

#### 10. Perspektif Keuangan Islam

Keuangan menurut perspektif Islam merupakan bentuk keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip ini melibatkan lebih dari sekadar aturan hukum sebaliknya, syariah mencerminkan gagasan bahwa semua manusia dan pemerintah harus tunduk pada keadilan di bawah hukum. Ruang lingkup keuangan Islam berkaitan dengan aktivitas yang melibatkan uang atau harta, dan harus dilakukan dengan memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperoleh kekayaan, dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma Islam.

#### 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

##### 1. Pengertian APBD



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah rencana keuangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006, APBD berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

## 2. Struktur APBD

Kebijakan otonomi daerah akan mengubah keuangan daerah, termasuk struktur APBD yang disesuaikan dengan PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, sebagai berikut:

### a) Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan daerah

## 12. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran mencakup gambaran umum tentang sumber, distribusi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah selama satu periode pelaporan.

## 13. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

### 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintah dan membangun pelayanan publik dengan membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Ini dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti pinjaman atau bantuan pemerintah pusat.

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{\text{realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat + provinsi + pinjaman}} \times 100$$

Hasil yang lebih baik menunjukkan bahwa suatu daerah lebih mandiri, yang berarti bahwa mereka tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

**Tabel 3.**  
**Kriteria Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian(%)</b>	<b>Pola hubungan</b>
Rendah Sekali	0,00 -25%	Instruktif
Rendah	25% -50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : [tim litbang depdagri – fisipol ugm, di aksesn 2023](#)

Tabel berikut menunjukkan bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhubungan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mencakup:

- a) Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih besar dari pada Kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi).
- b) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c) Pola Hubungan Partisipatif, peran pemerintah pusat semakin berkurang karena daerah yang bersangkutan semakin mampu melaksanakan otonomi.
- d) Pola Hubungan Delegatif, Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

## 2) Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Suatu proses kegiatan dikatakan efektif jika mencapai tujuan dan sasaran aktif dari kebijakan. efektivitas suatu kawasan koleksi adalah perbandingan pencapaian dan tujuan dari koleksi di daerah penerima, dan dengan demikian dapat dianggap sebagai keberhasilan koleksi. Rasio efektivitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD berdasarkan potensi rill daerah}} \times 100 \%$$

Kinerja keuangan pemerintah daerah dikategorikan efektif apabila rasio lebih dari 1 atau 100%. Berikut ini kriteria rasio efektifitas dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Kriteria Rasio Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah**

Persentase Keuangan (%)	Kinerja	kriteria
>100%		Sangat Efektif
90% - 100%		Efektif
80% - 90%		Cukup Efektif
60% - 80%		Kurang Efektif
0% - 60%		Tidak Efektif

Sumber : [Kepmendagri No. 690.900-327](#), diakses 2023

## 3) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi pendapatan asli daerah menunjukkan perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dan jumlah pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini, semakin buruk kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah efisien khususnya dalam bidang keuangan pemerintah daerah perlu menghitung berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk mencapai total pendapatan asli daerah yang diterima. Rasio efisiensi dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 atau kurang dari 100%. Semakin rendah rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Kriteria penilaian rasio efisiensi dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 5.**  
**Kriteria Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah**

Persentase Kinerja Keuangan (%)	kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : [Kepmendagri No. 690.900-327](#), diakses 2023

#### 4) Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya secara optimal antara belanja operasional dan belanja modal. Semakin tinggi proporsi dana yang dialokasikan pada belanja operasional, berarti proporsi belanja yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana perekonomian kepada masyarakat cenderung semakin rendah.

Ada dua perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini memberikan informasi kepada pembaca laporan mengenai proporsi belanja daerah yang dialokasikan terhadap belanja operasional. Beban operasional adalah beban yang manfaatnya dikeluarkan selama tahun anggaran, sehingga bersifat jangka pendek dan dalam beberapa kasus bersifat lancar atau berulang. Secara umum, proporsi belanja operasional mendominasi total belanja daerah, yaitu sebesar 60 hingga 90%. Pemerintah daerah berpendapatan tinggi cenderung menanggung biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah berpendapatan rendah.

Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{total Belanja operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio tersebut, pembaca laporan dapat mengetahui berapa proporsi belanja

daerah yang dialokasikan untuk investasi berupa belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat dalam jangka menengah hingga panjang dan merupakan hal yang lumrah. Secara umum rasio belanja investasi terhadap belanja daerah berkisar antara 5 hingga 20 %.

Rasio belanja modal dapat dirumuskan :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

#### 5) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan Yakni rasio untuk menimbang besaran atau ukuran kompetensi pemerintah daerah untuk membuat keberhasilan yang sudah diraih menjadi bertahan dan meningkat setiap periodenya,

rumusnya yakni:

Rasio pertumbuhan yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{realisasi penerimaan PAD } x_{n-1}} \times 100 \%$$

**Keterangan :**

$x_n$  = tahun sekarang.  $x_{n-1}$  = tahun sebelumnya.

## METODE PENELITIAN

### A. Metode dan Jenis Penelitian

Dimana didalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Dengan penelitian ini diharapkan bisa mendeskripsikan hasil analisis perbandingan rasio keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2018 sampai dengan tahun 2022

### B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo. Adapun waktu dan lamanya penelitian dimulai dari bulan Oktober sampai Januari tahun 2024.

### C. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, Data yang digunakan yaitu berupa Laporan Keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota Jambi dan Pemerintah

Kabupaten Tebo yang bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

#### **D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

- a. Pengumpulan data penelitian Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2018 sampai 2022 yang telah diudit oleh <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.
- b. Menghitung dan mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2018-2022 dengan menggunakan rasio keuangan yang digunakan.
- c. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2018-2022, Menarik Kesimpulan.

#### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil perhitungan, perbandingan kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Kabupaten Tebo dapat dirangkum dalam tabel berikut :

**Tabel 22.**  
**Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2018-2022**

<b>Analisis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>RATA-RATA</b>	
<b>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</b>	<b>Kota Jambi</b>						
	28%	32%	30%	32%	35%	31%	
	<b>Kabupaten Tebo</b>						
	8%	8%	8%	9%	7%	7%	
<b>Rasio Efektivitas</b>	<b>Kota Jambi</b>						
	103%	108%	88%	92%	94%	97%	
	<b>Kabupaten Tebo</b>						
	105%	112%	102%	120%	72%	102%	
<b>Rasio Efisiensi</b>	<b>Kota Jambi</b>						
	97%	98%	103%	105%	93%	99%	
	<b>Kabupaten Tebo</b>						
	95%	97%	94%	98%	99%	97%	
<b>Rasio keserasian</b>	<b>Kota Jambi</b>						
	Belanja Operasi	72%	222%	73%	72%	77%	103%
	Belanja modal	28%	26%	27%	28%	23%	27%
	<b>Kabupaten Tebo</b>						
	Belanja Operasi	75%	41%	86%	81%	67%	70%
	Belanja modal	25%	24%	14%	19%	33%	23%
<b>Rasio Pertumbuhan</b>	<b>Kota Jambi</b>						
	-15%	16%	-10%	8%	14%	3%	
	<b>Kabupaten Tebo</b>						
	11%	9%	-6%	18%	-36%	0%	

Sumber : Data hasil olahan (2023)

Berdasarkan tabel di atas, maka perbandingan kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2018-2022 tersebut yaitu :

1. Dilihat dari rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemandirian keuangan Kota Jambi lebih tinggi yaitu secara rata-rata mencapai 31% sedangkan Kabupaten Tebo hanya 7%. Tingkat kemandiran kota jambi masuk dalam pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi atau dapat dikatakan kemampuan keuangan kota masih rendah. Sedangkan Tingkat kemandiran Kabupaten Tebo masuk dalam pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari kemandirian daerah atau dapat dikatakan kemampuan keuangan kota masih rendah.
2. Dilihat dari tingkat efektivitas, tingkat efektifitas Kabupaten Tebo lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Jambi. Kabupaten Tebo memiliki tingkat efektifitas rata-rata yang mencapai 102%. sedangkan Kota Jambi mencapai 97%. Dari hasil ini, dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Tebo sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan daerah dibandingkan dengan Kota Jambi.

3. Dilihat dari rasio efisiensi menunjukkan presentase tingkat efisiensi Kabupaten Tebo lebih kecil yaitu 97% dibandingkan dengan Kota Jambi 99%. Untuk Kabupaten Tebo dan Kota Jambi dikategorikan kurang efisien dalam mengelola keuangan.
4. Dilihat dari rasio keserasian, kedua kota lebih mengalokasikan dana belanja daerah untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal. Kota Jambi secara rata-rata mengalokasikan untuk belanja rutin sebesar 103% dan belanja modal sebesar 27%. Sedangkan Kabupaten Tebo 70% untuk operasi dan 23% untuk belanja modal.
5. Dilihat dari rasio pertumbuhan, pertumbuhan PAD Kota Jambi lebih tinggi yaitu 3% Kota Jambi dibandingkan dengan pertumbuhan PAD Kabupaten Tebo yaitu sebesar 0%.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di pemerintah Kota Jambi dan pemerintah kabupaten tebo dari beberapa pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2018-2022 dilihat dari Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kota Jambi secara rata-rata lebih tinggi dibanding dengan kabupaten tebo.
2. Analisis Perbandingan kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2018-2022 dilihat dari Rasio efektivitas menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas menunjukkan Pemerintah Kabupaten Tebo lebih efektif dibanding dengan Kota Jambi.
3. Analisis Perbandingan kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2018-2022 dilihat dari Rasio Efisiensi menunjukkan presentase tingkat efisiensi Kabupaten Tebo lebih kecil dibandingkan dengan Kota Jambi. Untuk Kabupaten Tebo dan Kota Jambi dikategorikan kurang efisien dalam mengelola keuangan.
4. Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2018-2022 dilihat dari Rasio keserasian menunjukkan kedua daerah lebih mengalokasikan dananya untuk belanja operasi dibanding dengan belanja modal.
5. Analisis Perbandingan kinerja keuangan pemerintah kota jambi dan pemerintah kabupaten Tebo tahun 2018-2022 dilihat dari Rasio pertumbuhan bahwa pertumbuhan PAD kota Jambi lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten tebo.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Bps Kabupaten Tebo. *Kabupaten Tebo Dalam Angka Tebo Regency in Figures 2023*. Kabupaten Tebo: BPS Kabupaten Tebo/BPS-Statistics of Tebo Regency, 2023.
- Bps Kota Jambi. *Statistik Daerah Kota Jambi 2022/2023*. Kota Jambi: Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2023.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2016.
- Mahsun, M. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE., 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Titik, Inayati. *Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam*, 2018.

### **Jurnal**

- Arsad. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dompu)." *Jurnal Kajian Pendidikan & Ekonomi* 4, no. 1 (January 2021).
- Fathah, Rigel Nurul. "Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul." *Jurnal EBBANK* 8, no. 01 (June 2017).
- Fornia, Emilia, Mukhzarudfa, and Muhammad Gowon. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010 – 2019." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi* 6, no. 01 (March 2021).
- Hanik, Fitri Umi, and Tutik Dwi Karyanti. "Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja." *JABPI* 22, no. 2 (July 2014).
- Hikmah, Nurul. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Ogan Ilir Dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016-2019)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 01 (July 2017).
- Jaenuri. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Bojonegoro Dan Jombang Tahun 2010-2014." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14, no. 1 (June 2016).
- Jumiati, Ahmad Syukron Prasaja, and Efni Anita. "Analisis Pengukuran Tingkat Kinerja Keuangan APBD Provinsi Jambi Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Periode Tahun 2017-2020." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 04, no. 4 (2022).
- Karlina, Anis, and Nur Handayani. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6, no. 3 (March 2017).
- Khusaini, Moh. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press, 2018.
- Kusmila, Zesmi, and Mukhzarudfa Yudi. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Di Provinsi Jambi Sebelum Dan Setelah Pemekaran Wilayah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja* 3, no. 3 (December 2018).
- Lestari, Indah, As'ad Isma, and Nurlia Fusfita. "Analisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* 03, no. 3 (November 2023).
- Mengkuningtyas, Yeni. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Pemekaran." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 01, no. 4 (January 2018).
- PK, Dewi, and Hafni Nurlia. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 01 (June 2017).



- ramadhan, Arya. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021.” *journal of student research* 1, no. 4 (July 2023).
- Rianson Sihalo, Ghovin. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2016-2020.” *Journal Islamic Accounting Competency* 3, no. 01 (March 2023).
- Rohmad, Miftakur, As’ad Isma, and Fauzan Ramli. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (June 2023).
- Saputra, Sandy Candra, Wayan Suwendra, and Fridayana Yudiaatmaja. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun.” *Jurnal Manajemen* 4, no. 2 (October 2018).
- Sari, Imelda, Masagus Asaari, and Ika Sefty Nurul Hidayah. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019” (December 2021).
- Septa Soraida. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum dan Selama Pandemi.” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 2 (June 2022): 78–82.